

ABSTRACT

Louis Leonardo Muliadi Sondakh, 2024. **THE LEGAL CONSEQUENCES OF PT. HOME CREDIT INDONESIA'S PAY-LATER SYSTEM ON CREDIT AGREEMENTS**, supervised by: Dr. Rietha L. Lontoh, S.H., M.H and Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

The rapid development of the economy has prompted the Financial Services Authority, as the institution overseeing buying and selling activities through the pay later system, to issue POJK Number 7/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Lending and Borrowing Services. However, the OJK's oversight in this area has revealed certain weaknesses within the economic landscape, particularly concerning credit-based transactions. The limited scope of the OJK's authority, encompassing banks, non-bank financial institutions such as financing companies and pawn shops, and rural credit banks, has resulted in a lack of effective communication and clarification. This communication gap can lead to risks and misunderstandings, potentially causing conflicts between creditors and debtors. The absence of robust interaction between both parties, stemming from a lack of understanding and personal engagement, can further complicate documentation processes, which form the basis of credit agreements, especially in the purchase of electronic goods. This study aimed to examine the role of the OJK in supervising pay later system and analyze the legal consequences arising from such transactions conducted by Home Credit. Utilizing a normative juridical research method, secondary data collection, and qualitative analysis, this study addressed the research problem. The findings indicated that the OJK's current oversight mechanisms have shortcomings, leading to legal repercussions for credit agreements between creditors and debtors. The lack of coordination between these parties and the third-party vendors contributes to these issues. The study recommends stricter OJK supervision of pay later system. It emphasizes the need for these systems to adhere to all regulations and prioritize the protection of consumer rights.

Keywords: Pay Later, (OJK) Financial Services Authority, Legal Consequences.

ABSTRAK

Louis Leonardo Muliadi Sondakh, 2024. **AKIBAT HUKUM SISTEM PAY LATER PT. HOME CREDIT INDONESIA TERHADAP PERJANJIAN KREDIT**, dibimbing oleh: Dr. Rietha L. Lontoh, S.H., M.H dan Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

Perkembangan perekonomian yang pesat membuat Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang mengawasi kegiatan jual beli melalui sistem *pay later* mengeluarkan POJK Nomor 7/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pengawasan yang dilakukan oleh OJK ternyata dianggap masih memiliki kelemahan bagi perekonomian terlebih dalam kegiatan jual-beli secara kredit. Terbatasnya cakupan OJK pada bank, lembaga keuangan non-bank seperti perusahaan pembiayaan dan pegadaian, dan bank perkreditan rakyat, menyebabkan kelemahan dalam efektivitas yaitu kurangnya komunikasi dalam mengklarifikasi yang membuat timbulnya resiko dikarenakan masalah komunikasi dan informasi yang kurang, akibatnya menimbulkan ketidakpahaman yang dapat menimbulkan konflik antara kreditur dan debitur, dimana perlunya interaksi dari kedua pihak dikarenakan kurang paham dari kedua pihak dan karena kurangnya interaksi personal antara kedua pihak menyebabkan kompleksitas dalam dokumentasi yang nanti menjadi dasar dalam perjanjian kredit terlebih dalam jual beli barang elektronik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dari OJK dalam mengawasi dan akibat hukum yang timbul dari kegiatan jual beli melalui sistem *pay later* dari Home Credit, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pengumpulan data sekunder serta metode analisis kualitatif sehingga dapat menjawab permasalahan dengan hasil penelitian yaitu pengawasan yang dilakukan oleh OJK ternyata masih memiliki kekurangan sehingga berakibat hukum terhadap perjanjian kredit dari kreditur dan debitur dimana pihak ketiga yaitu pihak toko yang tidak berkoordinasi dengan kedua pihak sehingga menimbulkan masalah, maka saran dalam penelitian ini yaitu pengawasan OJK pada sistem *pay later* harus diperketat dan sistem *pay later* harus memenuhi setiap aturan dan melindungi hak-hak dari konsumen.

Kata Kunci: *Pay Later*, OJK, Akibat Hukum.